

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2001-2011

Disusun Oleh:
Denis Jakson Bimbin

Dosen Pembimbing
Rini Setyastuti

Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan 2001-2011. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Alat analisis yang digunakan untuk menentukan ketimpangan pembangunan ekonomi adalah analisis ketimpangan Williamson dan Analisis ketimpangan entropi Theil serta analisis Tipologi Klassen untuk mengetahui klasifikasi laju pertumbuhan ekonomi dan Analisis Konvergensi untuk mengetahui apakah kecenderungan perekonomian-perekonomian miskin tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian-perekonomian kaya.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Secara keseluruhan bahwa ketimpangan yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil hasilnya menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami ketimpangan, (2) Berdasarkan Tipologi Daerah terdapat daerah yang relatif cepat maju dan cepat tumbuh terdiri dari 5 kabupaten/kota, daerah yang relatif maju tapi tertekan terdiri dari 3 kabupaten, daerah yang relatif berkembang cepat terdiri dari 1 kabupaten, dan daerah yang relatif tertinggal terdiri dari 15 kabupaten. (3) Dari Analisis Konvergensi menunjukkan tidak terjadi konvergensi di Provinsi Sulawesi Selatan yang berarti kecenderungan perekonomian-perekonomian miskin tumbuh lebih lambat dibandingkan perekonomian-perekonomian kaya dengan demikian perekonomian daerah miskin lambat mengejar ketertinggalannya dan ketimpangan perekonomian antar daerah cenderung akan meningkat.

Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto, Ketimpangan.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Namun pada kenyataannya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai.

Perbedaan tingkat pendapatan per kapita yang cukup signifikan ini dapat menjadi salah satu indikasi adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan sebagai akibat oleh tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tersebut. Meskipun demikian, konsentrasi aktivitas ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu tidak dapat dihindari dan bahkan cenderung dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan salah satu bagian dari proses pembangunan di mana ketimpangan wilayah merupakan konsekuensi yang wajar asalkan masih dalam batas yang layak.

1.2 Masalah Penelitian

- a. Bagaimana ketimpangan pembangunan ekonomi antar Kabupaten/kota yang terjadi di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2011?
- b. Bagaimana klasifikasi pola dan struktur pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/kota yang terjadi di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2011?
- c. Apakah ada kecenderungan terjadinya konvergensi ekonomi antar Kabupaten/kota yang terjadi di provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2001-2011.
- b. Mengklasifikasikan kabupaten/kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan 2001-2011.
- c. Menganalisis kecenderungan terjadinya konvergensi ekonomi antar Kabupaten/kota yang terjadi di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2011.

2. Landasan Teori

2.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Menurut Rostow pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang menyebabkan perubahan karakteristik penting suatu masyarakat, misalnya perubahan keadaan sistem politik, struktur sosial, sistem nilai dalam masyarakat dan struktur ekonominya. Rostow membedakan proses pembangunan menjadi lima tahap yaitu: masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi. (Arsyad, 1999: 117).

Jhinghan (2010) mengajukan beberapa persyaratan pembangunan ekonomi yaitu:

- 1) Atas dasar kekuatan sendiri, pembangunan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri/daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari masyarakatnya.
- 2) Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan.

- 3) Perubahan struktural, artinya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri yang ditandai oleh meluasnya sektor sekunder dan tersier serta menyempitnya sektor primer.
- 4) Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi, bahkan disebut sebagai kunci utama menuju pembangunan ekonomi.
- 5) Kriteria investasi yang tepat, memiliki tujuan untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat tetapi tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian.
- 6) Persyaratan sosio-budaya. Wawasan sosio budaya serta organisasinya harus dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan.
- 7) Administrasi. Dibutuhkan alat perlengkapan administratif untuk perencanaan ekonomi dan pembangunan.

2.1.1 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

2.2 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator yang sangat penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai makna yang berbeda. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh sistem kelembagaan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *gross domestic product* (GDP) / *gross national product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan, atau apakah pertumbuhan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Berikut ini akan dijelaskan mengenai teori umum pertumbuhan ekonomi dari aliran klasik dan neo-klasik. Teori dari beberapa ahli ekonomi ini pada dasarnya untuk menciptakan tingkat kesejahteraan hidup dan pemenuhan kebutuhan hidup dengan sumber daya terbatas yang ada di bumi ini.

2.2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Adam Smith dalam bukunya "*An Inquiry into the nature and Causes of Wealth of the Nation*" mengemukakan faktor-faktor yang menimbulkan pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Jadi menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya perpacuan antara perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi.

2.2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan klasik. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan.

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Menurut teori neo-klasik, faktor-faktor produksi yang dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan *output* adalah jumlah

tenaga kerja dan *capital* (modal). Modal bisa dalam bentuk *finance* atau barang modal. Penambahan jumlah tenaga kerja dan modal dengan faktor-faktor produksi lain, misalnya tingkat produktivitas dari masing-masing faktor produksi tersebut atau secara keseluruhan tetap akan menambah *output* yang dihasilkan. Presentase pertumbuhan *output* bisa lebih besar (*increasing return to scale*), sama (*constant return to scale*), atau lebih kecil (*decreasing return to scale*) dibandingkan presentase pertumbuhan jumlah dari kedua faktor produksi tersebut.

2.3 Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah (Sjafrizal, 2008 : 104).

Faktor-faktor penyebab ketimpangan

- a. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah
- b. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah.
- c. Perbedaan sumber daya alam antar kabupaten/kota
- d. Perbedaan kondisi demografis antar wilayah.

2.4 Hubungan antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi

Pada umumnya untuk mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, perlu diketahui tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan nasional akan menentukan besarnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sering dijadikan patokan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Besarnya pendapatan per kapita sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk, sehingga apabila penambahan pendapatan nasional lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk, maka tingkat pendapatan per kapita penduduk meningkat. Apabila tingkat pertumbuhan pendapatan nasional lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, maka pendapatan per kapita akan turun. Usaha untuk mempertahankan tingkat pendapatan per kapita atau tingkat kesejahteraan relatif, perlu dicapai tingkat pertumbuhan pendapatan nasional yang sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk (Kuncoro, 2004 : 129).

Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita itu sendiri akan naik apabila produktivitas per kapita mengalami kenaikan. Untuk menaikkan produktivitas per kapita berarti perlu adanya perubahan struktur ekonomi, struktur produksi, teknik produksi, serta masyarakat yang statis berkembang menjadi masyarakat dinamis. Jadi untuk mengetahui laju pembangunan tidak cukup dengan melihat dari segi pendapatan per kapita saja, tetapi harus pula diikuti dengan perubahan dalam struktur ekonomi dan masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi baru dikatakan ada kemajuan apabila pendapatan nasional atau pendapatan per kapita naik dengan diikuti perubahan struktur ekonomi, teknik produksi, adanya modernisasi, dan masyarakat tradisional berkembang menjadi masyarakat dinamis yang berfikir rasional secara ekonomi dari tindakan-tindakannya

2.5 Konsep Konvergensi

Dalam konsep pertumbuhan ekonomi, konvergensi pertumbuhan adalah kecenderungan perekonomian-perekonomian miskin tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian-perekonomian kaya, dengan demikian diharapkan perekonomian daerah miskin dapat mengejar ketertinggalannya dan ketimpangan perekonomian antar daerah dapat menurun (Sukirno, 1985 : 31). Konvergensi terjadi ketika perekonomian miskin cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian kaya.

3. Metodologi Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Analisis Ketimpangan Williamson, Indeks Ketimpangan Entropi Theil, Analisis Tipologi Klassen dan Analisis konvergensi.

1. Indeks Ketimpangan Williamson

Ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan Indeks Ketimpangan Williamson (Sjafrizal, 1997 :31).

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Di mana :

V_w = indeks ketimpangan Williamson Provinsi Sulawesi Selatan

Y_i = PDRB per kapita Kabupaten/kota i

Y = rata-rata PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan

f_i = jumlah penduduk Kabupaten/kota i

n = jumlah penduduk provinsi Sulawesi Selatan.

Angka indeks ketimpangan Williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin kecil atau makin merata, dan apabila angka indeks jauh dari nol menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin melebar antar Kabupaten/Kota satu dengan yang lain.

2. Indeks Entropi Theil

Rumus dari indeks entropi Theil adalah sebagai berikut:

$$I(y) = \sum (y_j / Y) \times \log[(y_j / Y) / (x_j / X)]$$

Di mana: $I(y)$: Indeks entropi Theil

y_j : PDRB per kapita Kabupaten / Kota j

Y : rata-rata PDRB per kapita Sulawesi Selatan

x_j : jumlah penduduk Kabupaten / Kota i

X : jumlah penduduk Sulawesi Selatan

Indeks entropi Theil yang semakin membesar menunjukkan ketimpangan yang semakin membesar pula. Demikian pula sebaliknya, bila indeksnya semakin kecil maka ketimpangan akan semakin rendah/kecil, atau dengan kata lain semakin merata. Indeks ketimpangan entropi Theil tidak memiliki batas atas atau batas bawah, hanya apabila semakin besar nilainya maka semakin timpang dan semakin kecil semakin merata.

3. Analisis Tipologi Klassen

Alat Analisis Tipologi Klassen atau disebut juga Tipologi Daerah digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau PDRB per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB sebagai sumbu horizontal, daerah yang diteliti (dalam hal ini Kabupaten/kota yang diamati) dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah yang relatif cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), daerah relatif maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah yang relatif berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah yang relatif tertinggal (*low growth and low income*)

4. Analisis konvergensi

Untuk menguji apakah terjadi konvergensi (kabupaten yang lebih miskin tumbuh lebih cepat dari pada kabupaten yang lebih kaya) analisis yang digunakan adalah:

$$\ln(Y_i^T) = a + b \ln(Y_i^t) + \varepsilon_i$$

Dimana:

$\ln(Y_i^T)$: PDRB per kapita tahun akhir analisis

$\ln(Y_i^t)$: PDRB per kapita tahun dasar analisis

a : Konstanta

b : Koefisien regresi

T : Tahun analisis

t : Tahun dasar analisis

Jika nilai $b < 0$ maka akan menunjukkan bahwa pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung konvergen. Untuk melihat tingkat konvergensi yang terjadi, data yang digunakan adalah data PDRB per kapita tahun 2011, yang diregresikan dengan PDRB per kapita 2001.

Uji t dilakukan untuk membuktikan bahwa koefisien regresi dalam model secara statistik bersifat signifikan atau tidak.

Uji F digunakan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh koefisien regresi juga signifikan dalam menentukan nilai dari variabel tak bebas.

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat bahwa faktor-faktor pengganggu untuk pengamatan mempunyai varians yang sama. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, maka terdapat heteroskedastisitas

4. Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis Ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan

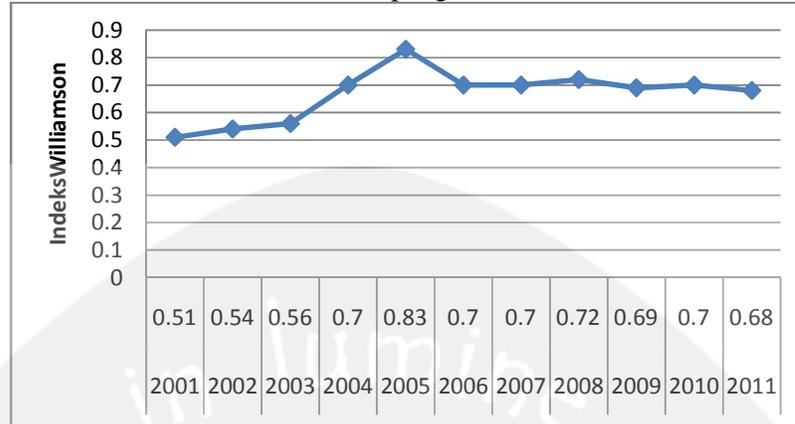
a. Indeks Williamson

Indeks Ketimpangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011

Tahun	Indeks Williamson	Perubahan
2001	0,51	-
2002	0,54	0.03
2003	0,56	0.02
2004	0,70	0.14
2005	0,83	0.13
2006	0,70	-0.13
2007	0,70	0
2008	0,72	0.02
2009	0,69	-0.03
2010	0,70	0.01
2011	0,68	-0.2
Rata-rata	0,66	-

(Sumber : Hasil analisis, Lampiran 6-16 hal 64-74)

Indeks Ketimpangan Williamson



(Sumber : Hasil analisis, Lampiran 6-16 hal 64-74)

Tingginya nilai indeks ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan secara rata-rata PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan relatif tinggi, sehingga nilai indeks Williamson yang berada di atas nol ini menunjukkan telah terjadi ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan dan besarnya nilai Indeks Williamson menunjukkan tingginya ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Indeks Entropi Theil

Indeks Entropi Theil Provinsi Sulawesi Selatan, 2001-2011

Tahun	Indeks Entropi Theil
2001	1,40
2002	1,39
2003	1,39
2004	1,50
2005	1,50
2006	1,50
2007	1,50
2008	1,49
2009	1,48
2010	1,49
2011	1,48

(Sumber : Hasil Analisis, Lampiran 17-27 hal 65-75)

Hasil Indeks Entropi Theil menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan terjadi pada tahun 2003-2004 yaitu dari 1.39 menjadi 1.50. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ketimpangan antar kabupaten/kota yang terjadi mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Selanjutnya pada tahun 2005 hingga 2007 nilai ketimpangannya tetap sebesar 1.50 dan pada taun 2008-2011 nilai ketimpangannya mengalami perubahan yang relatif kecil menjadi 1,48. Meski nilai ketimpangan Indeks Entropi Theil yang terjadi relatif tetap dari tahun 2005 hingga 2011 namun nilai tersebut cukup tinggi dan hal ini perlu diatasi.

2. Tipologi Daerah

Tipologi Klasen Provinsi Sulawesi Selatan 2001-2011

Kab/Kota	Laju Pertumbuhan	Pendapatan Perkapita	Klasifikasi Wilayah
Makassar	8,71	9.637.799	DAERAH YANG RELATIF CEPAT MAJU DAN CEPAT TUMBUH
Palopo	7,60	5.636.783	
Pare-Pare	6,50	5.015.066	
Sidrap	6,48	4.874.308	
Pangkep	6,42	7.050.537	
Pinrang	5,78	6.010.917	DAERAH YANG RELATIF MAJU TAPI TERTEKAN
Wajo	5,20	5.381.324	
Luwu Timur	3,93	19.182.627	
Luwu	6,33	3.986.583	DAERAH RELATIF BERKEMBANG CEPAT
Luwu Utara	6,04	3.747.294	DAERAH YANG RELATIF TERTINGGAL
Gowa	5,89	2.543.653	
Bantaeng	5,82	3.500.429	
Takalar	5,76	2.921.684	
Barru	5,68	3.707.936	
Sinjai	5,68	3.925.118	
Bone	5,63	3.680.271	
Bulukumba	5,48	3.668.067	
Enrekang	5,40	3.365.879	
Soppeng	5,30	4.373.113	
Tana Toraja	5,06	2.386.518	
Maros	4,76	3.200.461	
Jeneponto	4,37	2.257.727	
Toraja Utara	1,88	3.118.710	
Rata-rata	6,25	4.679.815	

3. Analisis Konvergensi

Hasil Analisis Konvergensi Tahun 2011

Dependent Variabel : LPDRB11				
Variabel	Koefisien	Standar Error	t-Statistik	Prob. t Statistik
Konstanta	3.070134	1.948071	1.575986	0.1300
LPDRB01	0.813352	0.142705	5.699546	0.0000
R-Squared	0.607365			
Adj. R-Squared	0.588668			
F Statistik	32.48483			
Prob. F Statistik	0.000012			

**Hasil Uji Heterokedastisitas
White Heteroskedasticity Test:**

F-statistic	0.252887	Probability	0.779001
Obs*R-squared	0.567294	Probability	0.753032

Berdasarkan hasil pengolahan data dan kriteria yang diajukan ternyata Probabilitas F-statistic (0,753032) lebih besar dari pada α (0.05) sehingga model yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas.

Ditunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik yaitu sebesar 0.0000 menunjukkan bahwa persamaan di atas telah mendukung keabsahan model, dan dapat juga dikatakan bahwa variabel dalam model persamaan berpengaruh nyata terhadap PDRB per kapita dengan tingkat signifikansi 1 persen.

Dari nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0000 dapat dikatakan bahwa nilai koefisien variabel Ln PDRB₀₁ berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Ln PDRB₁₁.

Hasil analisis konvergensi menunjukkan dari hasil persamaan regresi, di dapat nilai koefisien yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi konvergensi di Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan pembahasan terhadap Disparitas antar Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan :

1. Pada periode pengamatan tahun 2001-2011 terjadi tingkat disparitas Provinsi Sulawesi Selatan.
 - a) Berdasarkan analisis Indeks Williamson dapat disimpulkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2001-2011 mengalami peningkatan nilai ketimpangan yang cukup tinggi dari tahun 2001 hingga 2005 yaitu dari 0.51 menjadi 0.83. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ketimpangan antar kabupaten/kota yang terjadi semakin melebar. Selanjutnya pada tahun 2006-2011 nilai ketimpangannya mengalami kenaikan dan penurunan seperti pada tahun 2006 menjadi 0.70 dan selanjutnya nilai ketimpangannya mengalami perubahan yang relatif kecil hingga 2011 menjadi 0,68. Meski nilai ketimpangan Indeks Williamson yang terjadi relatif tetap dari tahun 2006 hingga 2011, namun nilai tersebut cukup tinggi dan hal ini perlu diatasi.
 - b) Berdasarkan analisis indeks Ketimpangan Entropi Theil dapat disimpulkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan terjadi pada tahun 2003-2004 yaitu dari 1.39 menjadi 1.50. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ketimpangan antar kabupaten/kota yang terjadi mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Selanjutnya pada tahun 2005 hingga 2007 nilai ketimpangannya tetap sebesar 1.50 dan pada taun 2008-2011 nilai ketimpangannya mengalami perubahan yang relatif kecil menjadi 1,48. Meski nilai ketimpangan Indeks Entropi Theil yang terjadi relatif tetap dari tahun 2005 hingga 2011 namun nilai tersebut cukup tinggi dan hal ini perlu diatasi.
2. Berdasarkan tipologi daerah (*Tipologi Klassen*) Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita menjadi empat kelompok, yaitu:

- a) Daerah yang relatif cepat maju dan cepat tumbuh terdiri dari 5 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pangkep, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-pare, Kota Palopo dan Kota Makassar.
 - b) Daerah yang relatif maju tapi tertekan terdiri dari 3 kabupaten yaitu Kabupaten Wajo, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Luwu Timur.
 - c) Daerah yang relatif berkembang cepat terdiri dari 1 kabupaten yaitu Kabupaten Luwu.
 - d) Daerah yang relatif tertinggal terdiri dari 15 kabupaten yaitu Kabupaten Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, Maros, Barru, Bone, Soppeng, Enrekang, Tanah Toraja, Luwu Utara, dan Toraja Utara.
3. Berdasarkan analisis konvergensi

Berdasarkan analisis konvergensi menunjukkan bahwa tingkat PDRB perkapita tahun dasar 2001 signifikan mempengaruhi PDRB perkapita tahun 2011 menunjukkan tidak terjadi konvergensi di Provinsi Sulawesi Selatan yang berarti kecenderungan perekonomian-perekonomian miskin tumbuh lebih lambat dibandingkan perekonomian-perekonomian kaya dengan demikian perekonomian daerah miskin lambat mengejar ketertinggalannya dan ketimpangan perekonomian antar daerah cenderung akan meningkat.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh di atas, terjadinya ketimpangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat diberikan beberapa saran yang dapat digunakan antara lain:

- 1) Basis ekonomi antardaerah perlu mendapatkan perhatian serius. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu seperti Kota Makassar, Kota Pare-pare dan Kota Palopo merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan antardaerah. Oleh karena itu, perlu adanya pemisahan antara pemerintahan, industri, dan perdagangan.
- 2) Diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi antara kabupaten/kota, terutama dalam daerah-daerah yang jauh dari kota (*hinterland*) untuk mengejar ketertinggalan pembangunan antarwilayah.
- 3) Diperlukan upaya terencana dan berkesinambungan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan (*growth with equity*) khususnya bagi daerah relatif tertinggal dengan strategi penanggulangan kemiskinan dan membuka isolasi daerah serta bagi daerah yang cepat maju dan berkembang dengan strategi menarik investasi dan promosi daerah.
- 4) Dengan hasil penelitian ini diharapkan pemerintah daerah dapat mendeteksi jika ada kesalahan dalam pengambilan kebijakan untuk mewujudkan distribusi perekonomian yang lebih merata, khususnya pada kebijakan transfer pendapatan. Distribusi perekonomian yang lebih merata akan dapat mengurangi *social welfare loss* yang berarti tingkat kesejahteraan masyarakat akan mencapai titik maksimal dari pendapatan atau PDRB yang dihasilkan.
- 5) Hasil penelitian ini akan lebih berarti bilamana dikaitkan dengan masalah-masalah sosial ekonomi lainnya seperti pendidikan, kesehatan, angkatan kerja, dan lain-lain. Untuk itu penulis menyarankan adanya penelitian lanjutan yang diharapkan dapat meninjau berbagai isu yang berkembang secara lebih luas dan mendalam.
- 6) Penelitian ini tidak mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan antarwilayah, untuk itu penulis menyarankan penelitian yang lebih luas dan terperinci mengenai aspek-aspek regional yang dapat menyebabkan kesenjangan antarwilayah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anwar, A., (2005), *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Tinjauan Kritis*. P4W Press Bogor.
- Arsyad, Lincoln., (1999), *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*”, Edisi Pertama, Balai Penerbit Fakultas Ekonomi, UGM, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln., (2005), *Pembangunan Ekonomi Daerah*”, Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta.
- Choirie, A. Effendy ., (2009). *Istiqomah Bersama Rakyat*, LP3ES, Jakarta
- Gujarati dan Porter.(2009). *Dasar – Dasar Ekonometrika*. Jakarta : Salemba Empat
- Kuncoro., (2002). *Analisis Spasial dan Regional: Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro., (2004) *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta : Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sjafrizal, (1997)., *Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*, Prisma.
- Sukirno. (1985). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suryana, (2000). *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, Salemba, Jakarta.
- Tambunan, tua t.h., (2001) *Transformasi Ekonomi di Indonesia: Teori dan Penemuan Empiris*, Salemba Empat, Jakarta.
- Tarigan, R. (2004). *Ekonomi Regional*, Teori dan Aplikasi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Todaro, Michael. P, (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*, Jilid 1, Jakarta : Pt Erlangga (Terjemahan)

B. JURNAL

- Arifin, Z., (2007), “Pertumbuhan, Sektor Unggulan, Kesenjangan dan Konvergensi Antar Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo”, Naskah Publikasi Pengembangan Ipteks UMM Malang.
- Kuncoro, Sutarno., (2003). “Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Bayumas, 1993-2000” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 8 No. 2, Desember 2003

C. SKRIPSI/TESIS

Adifa, Y., (2007), “ Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Pembangunan Di Kabupaten Alor”,*Tesis*, Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. diakses dari <http://repository.ipb.ac.id> pada tanggal 12 agustus 2013

Hastoto, E.,(2003). “Disparitas Pembangunan Regional di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo”. *Tesis*, Pascasarjana intitut Pertanian Bogor, diakses dari <http://repository.ipb.ac.id> pada tanggal 12 agustus 2013

Purwaningsi, Lusiana Vita, (2006). “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan (Kasus Kabupaten Sleman Tahun 1999-2003)”. *Skripsi SI*, UAJY, Yogyakarta (Tidak Dipublikasikan).

Putra, Andi N.E., (2012). “Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Kecamatan Di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999-2009”. *Skripsi SI*, UAJY, Yogyakarta (Tidak Dipublikasikan).

D. ARTIKEL

Badan Pusat Statistika Sulawesi Selatan. 2011. *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2011*. Badan Pusat Statistika. Makassar.

Badan Pusat Statistika Sulawesi Selatan. 2012. *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2012*. Badan Pusat Statistika. Makassar.

Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2005. *Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia nomor: 001/KEP/M-PDT/II/2005*